

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KEUANGAN

Semester III

Periode 2023

Kode Satker :402017

Jl. HM. Asyik Aqil KM. 16 Sukajadi Talang Kelapa

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 5723669



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN
BALAI

Untuk Periode yang Berakhir 29 September 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kelurahan Mulya Agung,
Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin 30911**

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 30 September 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,


ANDRIANTO FACHRIZAL

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Aset Lancar	35
C.2. Aset Tetap	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.6. Ekuitas	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	37
D.2. Beban Pegawai	37
D.3. Beban Persediaan	38

D.4.	Beban Barang dan Jasa	38
D.5.	Beban Pemeliharaan	38
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	38
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	38
D.8.	Beban Bantuan Sosial	39
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	39
D.11.	Beban Lain-lain	39
D.12.	Kegiatan Non Operasional	39
D.13.	Pos Luar Biasa	40
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1.	Ekuitas Awal	40
E.2.	Surplus (defisit) LO	40
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	40
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	40
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	40
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	41
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	41
E.3.	Ekuitas Akhir	41
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	41
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	41
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	41

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Kelurahan Mulya Agung,
Kecamatan Banyuasin III
Kabupaten Banyuasin 30911
Telp/fax : (0711)-5723669 e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September 2023 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 30 September 2023

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**


ANDRIANTO FACHRIZAL

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 September 2023	11
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 September 2023	33
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2023	33
Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2023	34

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp 167.800.000, (*seratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) sampai triwulan III sudah terserap 113.888.405,- (*seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah*)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 29 September 2023

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Triwulan III Tahun 2023 per 29 September 2023 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar 104.134.550,- (*seratus empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*)

kewajiban sebesar 0- dan Ekuitas sebesar Rp.-770.900,-(minus tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 September 2023
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.650,000	0	15.650,000	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	85.724,550	0	85.724,550	0,00
Persediaan	2.760,000	0	2.760,000	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	104,134,550	0	104,134,550	
JUMLAH ASET	104,134,550	0	104,134,550	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	85.724,550	0	85.724,550	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	3.530,900	0	3.530,900	0,00
Uang Muka dari KPPN	15.650,000	0	15.650,000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	104,905,450	0	104,905,450	
JUMLAH KEWAJIBAN	104,905,450	0	104,905,450	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(770,900)	0	(770,900)	0,00
JUMLAH EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	()
JUMLAH EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	104,134,550	0	104,134,550	

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Triwulan III Tahun 2023 untuk periode 2023, pendapatan Operasional sebesar 0,- Beban Operasional Rp0, Surplus / (Defisit)-LO sebesar Rp. (82.309.820),-(delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 September 2023 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp.0,- Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp.(82.309.820),-(*delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dan Ekuitas akhir sebesar Rp(770.900),-(*tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 (dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	35.698.000	39.294.000	3.596.000	110	16.028.000	18.573.500	(2.545.500)	116
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	35.698.000	39.294.000	3.596.000	110	16.028.000	18.573.500	(2.545.500)	116
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	167.800.000	113.888.405	53.911.595	68	73.905.000	53.300.500	20.604.500	72
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	167.800.000	113.888.405	53.911.585	68	73.905.000	53.300.500	20.504.500	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

II. *NERACA PERBANDINGAN*

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,650,000	0	15,650,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	85,724,550	0	85,724,550	0.00
Persediaan	2,760,000	0	2,760,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	104,134,550	0	104,134,550	
JUMLAH ASET	104,134,550	0	104,134,550	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	85,724,550	0	85,724,550	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,530,900	0	3,530,900	0.00
Uang Muka dari KPPN	15,650,000	0	15,650,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	104,905,450	0	104,905,450	
JUMLAH KEWAJIBAN	104,905,450	0	104,905,450	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(770,900)	0	(770,900)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	()
JUMLAH EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	104,134,550	0	104,134,550	

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39.294.000	18.573.500	20.720.500	111.559
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39.294.000	18.573.500	20.720.500	111.559
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	39.294.000	18.573.500	20.720.500	111.559
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	43.982.740	15.283.143	28.699.597	187.788
Beban Barang dan Jasa	49.621.080	19.125.000	30.496.080	159.457
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	28.000.000	25.251.000	2.749.000	10.887
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	121.603,820	59.659,143	61.944,677	103,831
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	100,337
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	100,337
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	100,337

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 SEPTEMBER 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	81,538,920	41,085,643	40,453,277	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	-
EKUITAS AKHIR	(770,900)	0	(770,900)	-

V. *CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2021 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*

2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang

disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara
dan
Hibah :
Rp
0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0,- persen. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	35.698.000	39.294.000	110
	Total Pendapatan	35.698.000	39.294.000	110

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
113.888.405

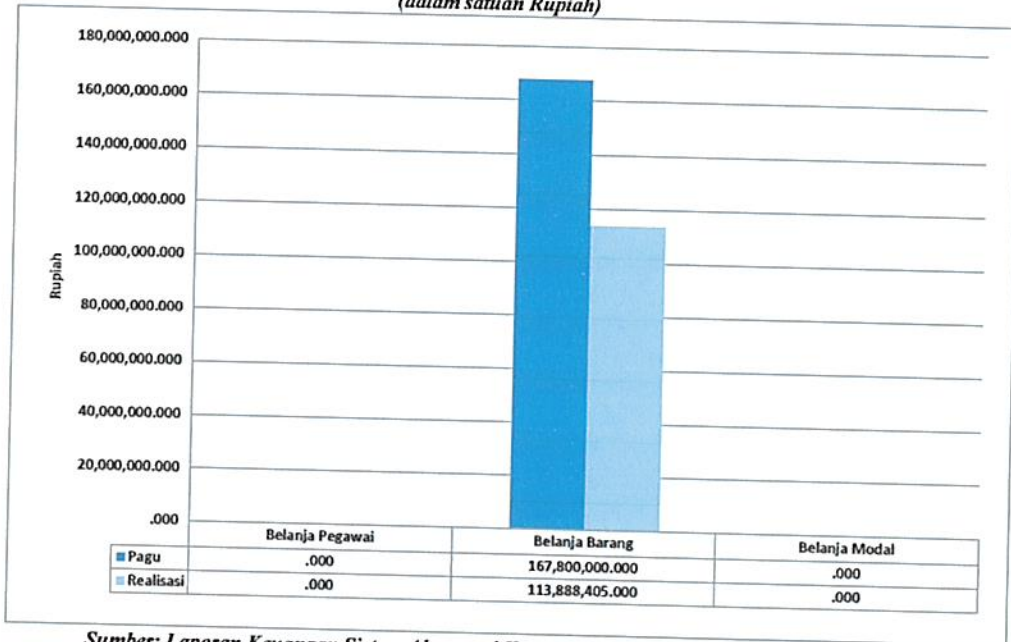
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp. 113.888.405,- (*seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah*) anggaran senilai Rp. 167.800.000,- (*seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	167.800.000	113.888.405	68
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	167.800.000	113.888.405	68

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Juni 2023

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp 0,-

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2023 Rp. 0,-dari anggaran awal sebesar Rp.0,-

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp
113.888.405

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2023 sebesar Rp. 113.888.405,-(seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah) anggaran senilai Rp. 167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September 2023

Modal :Rp 0,- adalah Rp.0,- dari anggaran Rp.0,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp104.134.550*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September 2023 sebesar Rp. 104.134.550,-(seratus empat ribu seratus tiga puluh empat lima ratus lima puluh rupiah)

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 15.650.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 sebesar Rp15.650.000,- (*lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 September 2023 sebesar Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp2.760.000*

Persediaan periode 30 September 2023 adalah sebesar Rp.0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0 Nilai Aset Tetap periode 30 September 2023 tersaji sebesar Rp 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 September 2023 adalah sebesar Rp. 0,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 September 2023 sebesar Rp.0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 September 2023 sebesar Rp.0,-

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 September 2023 sebesar Rp.0

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 September 2023 sebesar Rp.0,-

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp.0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 September 2023 sebesar Rp.0,-

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp104.905.450 Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 September 2023 sebesar Rp104.905.450,- (seratus empat juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp15.650.000 Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas: Rp770.900,- Ekuitas periode 30 September 2023 sebesar sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBp : Rp0,- Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp Rp 0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 0,- Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp 0,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
43.982.740,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 43.982.740,- (*empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) dan 15.283.143,- (*lima belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
49.621.080*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 Rp 49.621.080,- (*empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan puluh rupiah*). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp0*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp.0,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah Rp.0,-

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp0,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode30 September 2023 adalah Rp 0,-

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 September 2023 adalah Rp. 0,-

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp 0,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (82.309.820),- (*minus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dan Rp (41.085.643),- (*minus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (770.900),- (minus tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp.0,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrua dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi III, Tertanggal 11 Juli 2023;
2. Revisi IV tertanggal 17 Juli 2023;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihi

LAPORAN PENDUKUNG

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 30/10/23 2:30 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,294,000	18,573,500	20,720,500	111.559
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,294,000	18,573,500	20,720,500	111.559
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	39,294,000	18,573,500	20,720,500	111.559
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	43,982,740	15,283,143	28,699,597	187.786
Beban Barang dan Jasa	49,621,080	19,125,000	30,496,080	159.457
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	28,000,000	25,251,000	2,749,000	10.887
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 30/10/23 2:30 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	121,603,820	59,659,143	61,944,677	103.831
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	100.337
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	100.337
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	100.337

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom

197612032011011005



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM
 Tgl Cetak : 30/10/23 2:31 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,650,000	0	15,650,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	85,724,550	0	85,724,550	0.00
Persediaan	2,760,000	0	2,760,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	104,134,550	0	104,134,550	
JUMLAH ASET	104,134,550	0	104,134,550	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	85,724,550	0	85,724,550	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,530,900	0	3,530,900	0.00
Uang Muka dari KPPN	15,650,000	0	15,650,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	104,905,450	0	104,905,450	
JUMLAH KEWAJIBAN	104,905,450	0	104,905,450	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(770,900)	0	(770,900)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	()
JUMLAH EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	104,134,550	0	104,134,550	

Keterangan :
 BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023
 Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom
 197612032011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 30/10/23 2:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	113,888,405
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	39,294,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	740,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3,095,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	35,459,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,146,980	0
3.0	521211	Belanja Bahan	27,143,200	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,798,225	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	16,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,800,000	0
JUMLAH			153,182,405	153,182,405

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom

197612032011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 30/10/23 2:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,650,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	85,724,550	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,760,000	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	85,724,550
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,530,900
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	15,650,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	113,888,405
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	39,294,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,944,515
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	740,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3,095,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	35,459,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,366,480	0
3.0	521211	Beban Bahan	29,254,600	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	16,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	43,982,740	0
JUMLAH			265,032,370	265,032,370

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom

197612032011011005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 30/10/23 2:30 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(82,309,820)	(41,085,643)	(41,224,177)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	81,538,920	41,085,643	40,453,277	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(770,900)	0	(770,900)	-
EKUITAS AKHIR	(770,900)	0	(770,900)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom

197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REVISI IV)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 167,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			167,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			167,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	420.0 Perkara, Berkas Perkara		143,800,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.0 Perkara		143,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			67,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			67,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			13,200,000	RM
521811	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	31,429	13,200,000	
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			54,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	420.0 PKR	130,000	54,600,000	
052	Penetapan hari sidang			50,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			50,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	167	50,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			22,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			22,700,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			20,300,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	135,334	20,300,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			13,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			13,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	48,000	2,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			11,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	55,000	11,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			33,100,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			33,100,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			33,100,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	78,810	33,100,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			3,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REVISI IV)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 167,800,000

Halaman: 2

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			600,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 PKR	30,000	600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			3,200,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama TANPA SUB KOMPONEN			2,950,000	U
A				2,950,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	280,000	1,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			1,550,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 PKR	180,000	900,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 PKR	130,000	650,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	33.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	33.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	U
A				24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 JL	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 20 Oktober 2023

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ANDRIANTO FACHRIZAL S. Kom

NIP 197612032011011005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 402017

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM
 Tgl Cetak : 30/10/23 2:30 PM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023			2022				
		ANGGARAN 3	REALISASI 4	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN 5	% 6	ANGGARAN 3	REALISASI 4	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN 5	% 6
1	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	167.800,000	113.888,405	53.911,595	68	73.905,000	53.300,500	20.604,500	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
 BELUM FINAL

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

 ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom
 197612032011011005